

SKRIPSI

**POLITIK KEKUASAAN KELUARGA PADJALANGI DI
KABUPATEN BONE**



**DI Susun Oleh :
Irwan Syamsuddin
E111 16 511**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

POLITIK KEKUSAAN KELUARGA PADJALANGI DI KABUPATEN BONE

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Disusun dan diajukan Oleh:

Irwan Syamsuddin
E11116511

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**POLITIK KEKUASAAN KELUARGA PADJALANGI DI KABUPATEN
BONE**

Disusun dan diajukan oleh:

IRWAN SYAMSUDDIN

(E111 16 511)

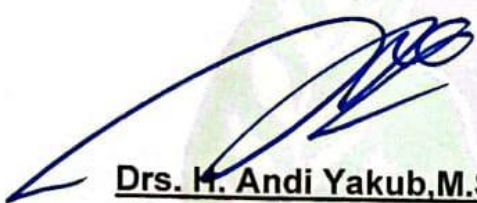
Akan diseminarkan dihadapan Tim Penguji Skripsi

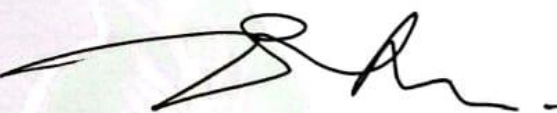
Pada Tanggal:

Menyetujui :

Pembimbing Utama

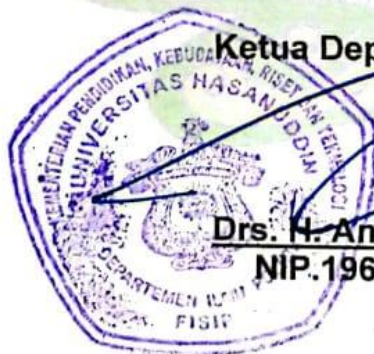
Pembimbing Pendamping


Drs. H. Andi Yakub, M.Si, P.hD
NIP.196212311990031023


Andi Naharuddin, S.IP., M.Si
NIP.197311222002121001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. Andi Yakub, M.Si, P.hD
NIP.196212311990031023

**HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI**

**POLITIK KEKUASAAN KELUARGA PADJALANGI DI
KABUPATEN BONE**

Disusun dan Diajukan oleh :

Irwan Syamsuddin

E11116511

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

Panitia ujian

Ketua : Drs. Andi Yakub, M.Si., P.hD.

(.....)

Sekretaris : Andi Naharudddin, S.IP., M.Si.

(.....)

Anggota : Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.

(.....)

Anggota : Ummi Suci Fathia B, S.IP., M.IP

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Syamsuddin

NIM : E11116511

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa Skripsi Yang berjudul " Politik Kekuasaan Keluarga Padjalangi di Kabupaten Bone " adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, Bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Agustus 2023



(Irwan Syamsuddin)

ABSTRAK

Irwan Syamsuddin (E11116511), dengan judul “Politik Kekuasaan Keluarga Padjalangi di Kabupaten Bone” dibawah bimbingan Dr. H. Andi Yakub, M.Si, P.hD sebagai Pembimbing I dan Andi Naharuddin, S.IP., M.Si sebagai pembimbing II

Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk kekuasaan Politik keluarga Padjalangi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat Kabupaten Bone dan Modal yang dibangun keluarga Padjalangi di Kabupaten Bone

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu memberikan gambaran serta penjelasan mengenai cara Keluarga Padjalangi mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam kancah politik di Kabupaten Bone. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data terkait tema penelitian yaitu dengan cara wawancara, observasi serta beberapa literatur yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian data yang telah diperoleh direduksi dan dipilih data yang sesuai dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam kancah politik di Kabupaten Bone yaitu dengan memanfaatkan Modalitas yang dimiliki. Modalitas tersebut meliputi modal sosial dan modal simbolik dengan modal sosial yang dibangun oleh keluarga Padjalangi dengan melakukan pendekatan dengan kelompok masyarakat serta dengan modal tersebut menguatkan modal simbolik dengan latar belakang Bangsawan marga Padjalangi menjadi kekuatan politik yang ada di Kabupaten Bone dalam meraih jabatan politik di Kabupaten Bone sehingga modal simbolik tersebut digunakan dan dapat memudahkan lebih dikenali masyarakat setiap anggota Keluarga Padjalangi yang mengikuti kontestasi politik.

Kata kunci: Politik Kekuasaan, Modal sosial, Modal simbolik

ABSTRACT

Irwan Syamsuddin (E11116511), with the title "Political Power of the Padjalangi Family in Bone Regency" under the guidance of Dr. H. Andi Yakub, M.Si, P.hD as counselor I dan Andi Naharuddin, S.IP., M.Si counselor II

The purpose of this study is to describe find out the form of political power of the Padjalangi family in gaining the trust of the people of Bone Regency and the capital built by the Padjalangi family in Bone Regency.

The research method used in this study is descriptive qualitative, namely providing an overview and explanation of how the Padjalangi family gained public trust in the political arena in Bone Regency. The data collection technique used in obtaining data related to the research theme is by means of interviews, observation and some literature related to the theme raised in this study. Then the data that has been obtained is reduced and selected data that is in accordance with the research problem.

The results of this study indicate that the way to gain public trust in the political arena in Bone Regency is by utilizing the Modality they have. These modalities include social capital and symbolic capital with social capital built by the Padjalangi family by approaching community groups and with this capital strengthening symbolic capital with a noble background, the Padjalangi clan becomes a political force in Bone Regency in gaining political office in Bone Regency. so that this symbolic capital is used and can make it easier for the public to recognize each member of the Padjali Family who takes part in political contests

Keywords: Power Politics, Social Capital, Symbolic Capital

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini berjudul “Politik Kekuasaan Keluarga Padjalangi di Kabupaten Bone”. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Almarhum Syamsuddin Manjeng dan Ibunda Nurlina yang sangat berjasa merawat, membesarkan, mendidik, mendoakan, memotivasi mendukung penuh di setiap jenjang pendidikan penulis hingga sekarang sampai pada tahap ini. beserta seluruh keluarga besar penulis yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan, motivasi serta doanya.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Andi Yakub, M.Si.,PhD dan Andi Naharuddin S.IP.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dari berbagai pihak telah memberikan dukungan, bantuan petunjuk serta motivasi dalam

menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ruang kepada penulis selama menempuh pendidikan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin
3. Ibu Dr.Hasniati, S.Sos,.M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan akademik.
4. Bapak Dr. Muhammad Iqbal Sultan, M.Si Selaku Wakil Dekan Perencanaan,Sumber daya dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi.
5. Bapak Prof Dr. Suparman, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan,Riset dan Inovasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.
6. Bapak Dr. Andi Yakub, M.Si.,PhD selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan administrasi di Departemen Ilmu politik dan Ilmu Pemerintahan.

7. Bapak Haryanto, S.IP.,MA. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan administrasi urusan-urusan administrasi di Program Studi Ilmu Politik.
8. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Alm. Bapak Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA, Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si, Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Alm. Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag, Bapak Dr. Andi Yakub, M.Si.,PhD, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo,M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP.,M.Si, Bapak Andi Naharuddin, S.IP.,M.Si, 7.Bapak Haryanto, S.IP.,MA. Bapak Dr. Imran, S.IP.,M.Si, Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP.,M.Si, Kanda Endang Sari, S.IP.,M.Si, Kanda Umni Suci Fathya Bailusy, S.IP.,M.Si, Kanda Zulhajar, S.IP.,M.Si, Kanda Dian Ekawaty, S.IP.,M.A yang telah banyak memberikan ilmu, saran dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Politik.
9. Kepada seluruh pegawai dan Staf Departemen Ilmu Politik yang telah senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi
10. Kepada Dr. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn., Bapak Andi Izman Maulana Padjalangi, S.H., M.Kn., Bapak Mukhawas Rasyid S.H., M.H. selaku narasumber/informan penelitian atas kesediannya menerima penulis dan menyisihkan waktu untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar Program Studi Ilmu Politik terkhusus angkatan 2016 yang telah menemani penulis

dalam berproses selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Politik.

12. Seluruh Senior dan Teman-teman UKM Sepakbola Fisip Unhas yang telah menemani berproses selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin dan memberikan banyak motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
13. Seluruh Teman-teman Pripol UH yang selalu membantu, menemani dan mensupport Penulis selama menempuh Pendidikan di Program Studi Ilmu Politik.
14. Kepada Adinusaid Rasyid, S.IP. yang selalu membantu dan memberikan bantuan selama Penulis Menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Politik.
15. Kepada Abdi Mahesa, S.S. yang tidak henti-hentinya mengingatkan dan memotivasi Penulis dalam Menyelesaikan Skripsi
16. Kepada Nindya Adella Prasiska yang telah mensupport dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi Penulis.
17. Kepada Ahmad Ardiansyah yang telah turut berperan menemani Penulis ketika menyelesaikan Penelitian di Kabupaten Bone.
18. Kepada Firdaus Amiruddin yang telah memberi bantuan dan semangat kepada Penulis.
19. Kepada Teman-Teman Tante Empire yang selalu memberikan semangat dan memberikan dukungan moral selama Penulis berproses untuk menyelesaikan studi di program studi Ilmu Politik.
20. Kepada Organisasi KRAB (Kelompok Remaja Amal Bhakti) sebuah Organisasi yang menjadi wadah Penulis untuk belajar dan memberi pengalaman dalam Berorganisasi.

21. Kepada H. Muhammadiyah djunaid, SE. dan Taufan Imani Muhammad yang selalu memberikan motivasi serta memberikan wadah dalam mengembangkan keilmuan yang selama ini penulis tempuh di Proogram Studi Ilmu Politik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini masih terapat kekurangan dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Namun, penulis meyakini bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat di ambil untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik kedepannya. Oleh karena itu, segala masukan berupa saran dan kritikan yang membangun senantiasa penulis terima bagi semua pihak untuk meningkatkan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini dan untuk memperbaiki karya ilmiah penulis selanjutnya.

Makassar, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PENERIMAAN	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	IV
ABSTRAK	V
ABSTRACT	VIII
KATA PENGANTAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2. Telaah Pustaka	10
A. Teori Kekuasaan	11
B Strategi kekuasaan	15
C. Teori Modalitas	16
2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
2.1.1 Skema Kerangka Pikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Lokasi Penelitian	22
3.2 Dasar, Tipe, dan Jenis Penelitian.....	22
3.3 Sumber Data.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25

3.5 Informan Penelitian	26
3.6 Teknik Analisis data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	28
4.1. Gambaran umum Kabupaten Bone.....	28
Gambar 4.1. Peta Kabupaten Bone.....	28
4.2. Profil Keluarga Padjalangi	30
4.3. Politik Kekuasaan Keluarga Padjalangi	31
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
5.1. MODAL SOSIAL	34
5.2. MODAL SIMBOLIK.....	40
BAB VI PENUTUP.....	48
6.1 Kesimpulan.....	48
1. Modal sosial	48
2.Modal simbolik	49
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Politik adalah sebagai jalan atau cara untuk meraih Kekuasaan, dengan berpolitik setiap orang atau setiap kelompok dapat menguasai suatu wilayah dengan menjadi kepala Daerah atau menjadi kepala Negara maka Politik merupakan hal yang erat kaitannya dengan Kekuasaan sehingga dalam berpolitik dibutuhkan penguasa yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Politik memiliki sebuah sistem politik berdasarkan unsur-unsur yang saling berkaitan (*interrelated*) dan saling bergantung (*interdependent*). Sehingga Politik berarti memiliki berbagai macam proses politik yang terjadi di sebuah negara maupun daerah yang berkaitan pada proses menetapkan tujuan dan bagaimana mencapai sebuah tujuan.¹ Oleh karena itu, Politik sangat berkaitan pada sebuah kekuasaan. Sehingga dapat di definisikan bahwa ruang lingkup politik berdasarkan tentang eksistensi, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan distributor of power dalam sebuah pemerintahan atau kekuasaan.²

Riker (1964) berpendapat bahwa perbedaan dalam kekuasaan benar-benar berdasarkan pada perbedaan kausalitas

¹ 1Ng. Philipus, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 104

² A. Rahman H.I., *Sistem Politik Indonesia...*, h 7.

(sebab-akibat). Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh, sedangkan alasan adalah penggunaan pengaruh yang sebenarnya., Russel (1983) menyatakan bahwa power (kekuasaan) adalah konsep dasar dalam ilmu sosial. Kekuasaan penting dalam kehidupan organisasi, dan bahwa kekuasaan dalam organisasi terikat dengan status seseorang, Menurut (Budiardjo, 2008:60) kekuasaan adalah "kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga prilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari seseorang yang mempunyai kemampuan". Seseorang atau sekelompok orang dapat memiliki kekuasaan apabila memiliki suatu sumber daya kekuasaan. Sumber daya kekuasaan dapat berupa seperti halnya kedudukan, kekayaan, kecerdasan atau keterampilan dan kepercayaan atau agama

Dalam berpolitik terdapat dua unsur yang sangat melekat, yaitu antara penguasa dan masyarakat beserta kelompok organisasi yang dibentuknya. Proses untuk menuju panggung politik bisa dilalui atau dilakukan oleh siapa saja selama memiliki kapasitas untuk memimpin. Politik bukan hanya bisa dijalankan atau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki berkpasitas dan memiliki kekuasaan tetapi bisa juga dilakukan oleh kalangan apa saja. Kekuasaan saat ini telah menjadi sesuatu yang membuat berbagai kalangan dan kelompok Berlomba-lomba ingin mencapainya dengan jalan Berpolitik sehingga untuk menjadi penguasa setiap orang atau kelompok harus berusaha menjadi populer atau berusaha menjadi jauh lebih dikenal oleh Masyarakat dan bisa menjadi daya tarik masyarakat mayoritas karena dengan kemampuan meraih animo masyarakat mayoritas maka untuk menjadi sebuah penguasa terutama di Indonesia menjadi lebih mudah diraih karena pada dasarnya kekuasaan politik adalah

memiliki kemampuan pribadi atau kelompok dengan memanfaatkan setiap aspek-aspek kekuatan yang mampu menunjang kekuasaan apalagi ditambah jika seorang figur memiliki kedudukan dan status sosial yang melekat pada dirinya sebab di Indonesia itu sendiri di beberapa daerah yang masih mengedepankan status sosial sebagai faktor kekuatan yang penting dalam budaya politik di beberapa daerah untuk meraih kekuasaan.

Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang pada konteks politik, memiliki keterkaitan dengan upaya penyelenggaraan kehidupan dalam bernegara dalam mewujudkan tujuan-tujuan politik yang dilakukan dengan segala kewenangannya. Pada hakikatnya setiap orang selalu ingin berusaha melanggengkan kekuasaan yang ia miliki, Oleh karena itu dengan kekuasaan itu, ia memiliki kemampuan dan dapat menjalankan wewenang yang melekat pada dirinya, sehingga semakin lama ia berkuasa, semakin menguatkan pengaruhnya di lingkungan kekuasaannya

Di Indonesia itu sendiri dalam sebuah panggung politiknya memiliki karakteristik yang cukup menarik sebab popularitas menjadi sebuah modal besar ketika menjadi figur yang ingin terjun ke dunia politik apalagi jika yang menjadi populer itu adalah keluarga sehingga terbentuklah yang namanya politik Kekeluargaan dan menunjukkan bahwa keluarga bisa menjadi alat yang tepat dalam membentuk sebuah kekuasaan politik yang sangat kuat dan cenderung bertransformasi strategi dan metode elite politik dalam meraih kekuasaan dengan memanfaatkan politik Kekeluargaan yang telah membudaya di Indonesia dan terjadi begitu banyak di daerah-daerah sehingga konsepnya politik Kekeluargaan yang membentuk kekuasaan politik keluarga adalah sebuah perilaku politik, strategi politik, orientasinya menjadi

sebuah kebudayaan yang melekat pada masyarakat Indonesia. Fenomena Kekuasaan politik keluarga dalam bentuk politik Kekeluargaan hampir disetiap daerah di Indonesia bahkan di Sulawesi Selatan dapat kita temui dan seakin marak bahkan grafiknya semakin meningkat dalam berbagai jabatan politik seperti di Lembaga Legislatif DPR,DPRD, maupun di DPD,aataupn juga ada yang memegang jabatan disebuah instansi pemerintahan,dan pada jabatan Eksekutif sebagai Kepala Daerah, Sehingga politik kekeluargaan membuat sebuah kekuasaan yang menguatkan jaringan politik yang berdasarkan kedekatan politik keluarga sehingga sedikit menutup celah rekrutmen politik bagi orang-orang yang tidak berafiliasi.

Lembaga penelitian Nagara Institut mengumumkan hasil sebuah riset terbaru dari mereka tentang politik dinasti pada Pilkada Serentak 2020. Dalam riset tersebut ditemukan terdapat, sebanyak 124 calon kepala daerah diketahui adanya dinasti politik. Rinciannya, 57 calon bupati dan 30 calon wakil bupati, 20 calon wali kota dan 8 calon wakil wali kota, serta 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur. Saat ini fenomena kekuasaan politik keluarga yang paling fenomenal adalah anak dari Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka bisa dipastikan bakal menjadi Walikota Solo yang dimana Posisi yang sempat di emban oleh ayahnya yang juga menantu dari Presiden Joko Widodo yaitu Bobby Nasution memenangkan pilkada Walikota Medan. Di Sulawesi Selatan kekuasaan politik keluarga dalam bentuk dinasti politik yang cukup besar dan diketahui oleh berbagai kalangan dan sangat familiar adalah keluarga Yasin Limpo yang dimana berbagai jabatan strategis pernah bahkan ada yang masih di duduki oleh dinasti politik keluarga Yasin Limpo, keturunan Yasin Limpo anak dan cucunya yang terjun ke dunia politik.

Di salah satu Kabupaten terdapat pula sebuah peta kekuatan lainnya yang menambah rentetan kekuasaan politik keluarga yang telah ada sebelumnya yaitu hadirnya keluarga Padjalangi menjadi sebuah kekuatan baru di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bone Menelusuri kekuasaan keluarga padjalangi menduduki beberapa jabatan yang sangat strategis di kanca politik Kab.Bone maupun di nasional, hal ini dapat di buktikan 4 tokoh yang sangat berpengaruh dalam perpolitikan kab. Bone, yakni Andi Fashar Padjalangi yang merupakan Bupati kab. Bone 2 periode yang berakhir 2023 dan terdapat pula anaknya Andi Izman Maulana Padjalangi yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rio Padjalangi merupakan anggota DPR-RI yang menjabat selama 3 periode yang berakhir pada tahun 2024, Andi Yagkin padjalangi merupakan petinggi Partai PDI-P Sulawesi selatan dan juga pernah menjabat DPRD sulawei selatan dapil kab. Bone, dan saat ini anak dari bupati Bone yakni Andi Izman Padjalangi menduduki jabatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari dapil Kab. Bone.

Hal ini menjadi fenomena politik, bahwa keluarga padjalangi saat ini sangat dominan di kab. Bone, berbagai jabatan tinggi dan strategi di kuasa oleh Keluarga Besar Padjalangi. Bahkan fenomena unik keluarga padjalangi saling bersaing di Kab. Bone, seperti Pileg 2019, Andi Rio Padjalangi dan Andi Yagkin Padjalangi yang ingin meraih suara terbanyak di kab. Bone, mereka bersaing berbeda partai namun basis yang sama. Andi Rio Padjalangi berasal dari Partai Golkar dan Andi Yagkin Padjalangi berasal dari Parti PDI-P. saat ini kab. Bone akan menghadapi pemilu Bupati pada tahun 2023, nama yang saat ini

muncul sebagai bursa calon bupati yakni Andi Rio Padjalangi dan Andi Yagkin Padjalangi, secara tidak langsung bahwa Keluarga Padjalangi akan bersaing dengan keturunan yang sama, keduanya merupakan Paman dan Ponakan.

Kekuasaan politik Keluarga Padjalangi amat sangatlah berpengaruh, mematahkan pengaruh beberapa tokoh politik di Kab. Bone, hal ini menjadi Kekuasaan Politik Keluarga Padjalangi menjadi ketakutan bagi para politisi di kab. Bone.

1.1 Tabel Keluarga Padjalangi

NO	Nama-nama Keluarga Padjalangi	Jabatan	Posisi dalam Keluarga	periode
1	Andi Fashar M. Padjalangi	Bupati Kab. Bone.	Anak	2013 – 2023
2	Andi Kasma Padjalangi	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone.	Anak	--
3	Andi Yagkin Padjalangi	Anggota DPRD Provinsi Sulsel	Anak	2014 - 2019
4	Andi Rio Idris Padjalangi	Anggota DPR-RI	Cucu	2019 - 2024
5	Andi Izman Maulana Padjalangi	Anggota DPRD Provinsi Sulsel	Cucu	2019 – 2024
6	Andi Ryad Baso Padjalangi	Anggota DPRD Kab. Bone	Cucu	2019 – 2024

Sumber:<http://id.m.wikipedia.org>

Hal inilah yang kemudian mendorong saya untuk meneliti Politik Kekuasaan Keluarga Padjalangi menjadi hal yang menarik untuk di teliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul Politik Kekuasaan Keluarga Padjalangi, adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana bentuk kekuasaan Politik keluarga Padjalangi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat Kabupaten Bone ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini ialah:

1. Mengetahui faktor-faktor yang membuat Keluarga Padjalangi mendapatkan kepercayaan masyarakat Kab. Bone

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis
 - a. Untuk memberikan penjelasan secara teoritis serta memberikan pengetahuan teori dalam ilmu politik khususnya tentang teori politik kekuasaan.
 - b. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat Masyarakat mendapatkan literasi bahwa politik Kekuasaan yang terjadi saat ini bernilai Positif selama yang menduduki jabatan politik memiliki kompetensi sebagai pejabat publik.
 - c. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana program strata satu (S-1) di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

2. Aspek Praktis

- a. Dengan adanya Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah gambaran tentang Politik Kekuasaan Keluarga Padjalangi di Kab. Bone
- b. Hasil penelitian ini nantinya mampu menjadi sebuah acuan pada Penelitian yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2 Telaah Pustaka

Istilah kekuasaan penggunaannya telah lama di berbagai kalangan para pakar dan ahli politik, karena kekuasaan tidak hanya kita dapat jumpai di dalam suatu negara saja, Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo, 2003). tetapi juga ada di dalam kalangan masyarakat sendiri kekuasaan juga didasarkan kaitannya atas unsur kepercayaan keturunan dalam arti ketika seseorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas dan kemampuan yang sesuai seperti yang diinginkannya.

Penelitian yang relevan yaitu penelitian yang telah dibuat oleh Zaldy Rusnaedy dan Titin Purwaningsih. Penelitian yang berjudul Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa modal yang paling berpengaruh pada yang dasarnya merupakan sebuah warisan sumber daya yang dimiliki oleh salah seorang anggota keluarga senior dari keluarga tersebut yang menjabat sebagai bupati sebelumnya selama dua periode. Penguasaan sumber-sumber yang kemudian diwariskan tersebut berdampak terhadap dukungan publik kepada kandidat dari keluarga tersebut pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2015. Warisan modal tersebut berupa warisan basis massa, warisan birokrasi dan warisan program unggulan yang merupakan modal yang sangat berpengaruh. Pada penelitian

tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh keluarga besar yasin limpo dalam terpilihnya adnan sebagai bupati gowa periode 2015-2020 dengan mengandalkan faktor nama besar dari keluarganya sehingga terpilihnya Adnan merupakan faktor determinan dari kekuatan dan pengaruh Ichsan Yasin Limpo (orang tua dan bupati sebelumnya). Pewarisan modal berupa warisan basis massa, warisan birokrasi dan warisan program unggulan merupakan modal yang paling besar dan mempunyai pengaruh yang cukup besar.³

A. Teori Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo, 2003)⁴.

. Foucault (2007) mendefinisikan Kekuasaan adalah soal praktik-praktik konkrit yang lantas menciptakan realitas dan pola-pola perilaku, memproduksi wilayah objek-objek pengetahuan dan ritual-ritual kebenaran yang khas.⁵ Menurut Michael Foucault merupakan suatu hubungan, dimana adanya sebuah relasi disana ada kekuasaan. Relasi kuasa seringkali menjadi sebuah dasar setiap proses politik dalam tingkat individu maupun juga kelompok. Relasi kuasa merupakan esensi dari berpolitik, kekuasaan berkaitan dengan strategi praktek merupakan suatu landasan yang dimana ada beberapa posisi strategis yang berkaitan satu sama lain.

³ Rusnaedy, Zaldy and Purwaningsih, Titin (2018) "Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015

⁴ Prof. Miriam Budiardjo, Cetakan Keempat, 2008, Dasar-Dasar Ilmu politik, Jakarta, Penerbit

Gramedia pustaka Utama. Hal. 59-60

⁵ Swadesta Aria Wasesa, Relasi Kuasa dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari, Skripsi, (Yogyakarta, 2013) Hal 16

Untuk menggunakan kekuasaan politik harus ada penguasa yaitu pelaku yang memegang kekuasaan dan ada alat/sarana kekuasaan. Penguasa perlu keabsahan/legitimasi, keabsahan adalah konsep bahwa kedudukan seseorang atau sekelompok penguasa dianggap baik oleh masyarakat sesuai asas dan prosedur yang berlaku.⁶

Kekuasaan dapat dibedakan dengan kewenangan. Hal ini dikarenakan kewenangan adalah kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan memiliki nilai keabsahan, Sedangkan kekuasaan tidak selamanya memiliki nilai keabsahan. Kekuasaan merupakan suatu hal yang lumrah dan terdapat dalam setiap lingkup masyarakat, dalam semua bentuk hidup bersama. Hal ini karena setiap manusia memiliki berbagai macam keinginan dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, diperlukan pemaksaan kemauan atas orang lain maupun kelompok lain. Maka disitulah terbentuknya kekuasaan.

Menurut Charles F. Andrain,(1992), kekuasaan dimengerti sebagai penggunaan sejumlah sumber daya (aset dan kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain. Kekuasaan pada hakikatnya merupakan suatu hubungan, karena pemegang kekuasaan menjalankan kontrol terhadap orang lain. Pemegang kekuasaan terdiri dari seorang individu ataupun kelompok, misalnya pemimpin politik nasional⁷.

Kekuasaan politik local saat ini semakin terlihat nyata. Secara teoritis, para keluarga/kerabat/kelompok politik

⁶ Dr. H. Kabul Budiyono, M.Si, Teori dan Filsafat Ilmu Politik, (Bandung: Penerbit Alfabeta,2012), Halaman 26

⁷ Andrain, Charles F. Political Life and Social Change. Terj. Luqman Hakim, Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

menggunakan berbagai modal seperti yang kita kenal kategorisasi modal dari Bourdieu yaitu modal simbolik, modal kultural, modal sosial sebagai basis legitimasi kekuasaan.

Menurut Haryanto, 2014, Mayoritas studi di Indonesia pada umumnya lebih fokus pada dua hal yakni:

- 1) fenomena politis yang terjadi setelah para actor politik berhasil mendapatkan kekuasaan dengan cara sedemikian rupa sehingga terciptanya oligarki.
- 2) proses-proses tata kelola politik pemerintahan yang mereka lakukan (kepiawaian mengelola modal politik) sebagai pejabat, pengusaha, ataupun bangsawan.⁸

Terdapat bias antara penggunaan istilah politik keluarga dan politik dinasti (sering digunakan pada system monarki). Walaupun nanti akan tetap muncul istilah dinasti politik dikarenakan istilah ini sering digunakan para peneliti lainnya dalam menyebut fenomena politik keluarga, dengan maksud pengertian yang serupa. Munculnya fenomena politik keluarga sendiri ditandai oleh keikutsertaan suami, istri, anak, dan kerabat lainnya dari petahana dalam kancah politik, baik itu pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), atau penempatan jabatan penting lainnya.⁹

Semakin menguatnya politik keluarga, mengindikasikan gejala apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai neopatrimonialistik, yaitu raja-raja kecil di daerah yang semakin

⁸ Fitri Aprilia Foketea, Wawan Mas'udi. "Konsolidasi Elite Dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus di Kabupaten Kepulauan Sula", *Journal of Governance and Social Policy*, Vol. 1 Issue 2, December 2020 hlm 71.

⁹ *Ibid*

memperluas kekuasaan politiknya melalui jaringan kekerabatan (Sujarwoto 2016)¹⁰

Kekuasaan Politik beranggapan bahwa Politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah merebutkan dan mempertahankan Kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan Kekuasaan (*power struggle*) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh Masyarakat.

Pendekatan ini, yang banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang lingkungannya dan juga mencakup gejala-gejala sosial seperti Serikat Buruh, Organisasi Keagamaan, Organisasi Mahasiswa, Dan Kaum Militer. Pendekatan ini lebih dinamis daripada Pendekatan Institusional karena memerhatikan proses.¹¹

¹⁰ Fitri Aprilia Foketea, Wawan Mas'udi. "Konsolidasi Elite Dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus di Kabupaten Kepulauan Sula", *Journal of Governance and Social Policy*, Vol. 1 Issue 2, December 2020 hlm 72.

¹¹ Prof. Miriam Budiahrjo, Cetakan Keempat, 2008, Dasar-Dasar Ilmu politik, Jakarta, Penerbit Gramedia pustaka Utama. Hal. 18

B Strategi kekuasaan

Strategi kekuasaan adalah cara individu menjadi sebuah landasan kekuasaan terhadap tindakan-tindakan tertentu. Dibagian ini kita dapat melihat kembali berbagai macam pilihan taktik yang populer pada suatu kondisi yang mungkin lebih efektif dibanding yang lain. Berikut berbagai macam taktik yang bisa memiliki pengaruh, yaitu :

1. Persuasi rasional Memberikan argumen-argumen yang logis sehingga meyakinkan sehingga memberikan bukti faktual untuk memperlihatkan bahwa apa yang disampaikan itu masuk akal.
2. Seruan inspirasional Membangun sebuah komitmen emosional dengan cara menyampaikan nilai-nilai, kebutuhan, harapan, serta aspirasi sebuah sasaran.
3. Konsultasi Memberikan sebuah motivasi dan dukungan kepada pihak yang menjadi sasaran dengan cara melibatkannya dalam memutuskan bagaimana rencana atau suatu perubahan akan di jalankan.
4. mengapresiasi dengan Memberikan suatu imbalan kepada target atau sasaran berupa uang atau penghargaan lain sebagai apresiasi karena telah mau menaati suatu permintaan.
5. Seruan pribadi Meminta kepatuhan berdasarkan ikatan emosional persahabatan atau kesetiaan.
6. Menyenangkan orang lain Menggunakan rayuan, pujian, atau perilaku bersahabat sebelum membuat permintaan.

7. Memberi tekanan dengan cara Memberi peringatan, tuntutan tegas, serta ancaman.

8. Koalisi, membutuhkan bantuan orang lain untuk membujuk sasaran (target) atau mendapatkan dukungan orang lain sebagai alasan agar si sasaran

C. Teori Modalitas

Teori modalitas politik dalam penjelasannya pertama kali dikemukakan oleh Bourdieu, ia adalah tokoh sosiologi Prancis yang menyatakan bahwa kekuasaan seseorang dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan kapital (modal – modal) serta komposisi dan akumulasi dari modal – modal yang dimiliki tersebut.

Konsepsi atas teori modal Bourdieu tidak bisa dilepaskan dari konsep dominasi lainnya. Sehingga pemikiran Bourdieu ini ada keterkaitan dengan konsep kekuasaan yang lain, yakni habitus dan ranah (Arena). Habitus dalam teori sosiologi dimaksudkan sebagai struktur mental kognitif yang menghubungkan manusia dengan dunia sosial. Manusia dianggap dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang digunakan untuk melahirkan persepsi, pemahaman, apresiasi dan evaluasi atau kemampuan menilai terhadap dunia sosial.

Dalam suatu ranah ada pertarungan, kekuatan – kekuatan serta orang yang memiliki banyak modal dan orang yang tidak memiliki modal. Di dalam ranah, “pertarungan” sosial selalu terjadi. Siapa saja yang memiliki modal dan habitus yang sama dengan kebanyakan individu akan lebih mampu melakukan tindakan mempertahankan atau mengubah struktur dibandingkan

dengan mereka yang tidak memiliki modal. Artinya modal disini menjadi instrumen penting dalam pelestarian kekuasaan politik.¹²

A. Modal Sosial

Modal sosial yaitu dukungan kepada figur atau kandidat karena ketokohan yang dimiliki sehingga munculnya kepercayaan (trust) dari masyarakat sehingga menciptakan interaksi sosial dan terciptanya jaringan-jaringan yang mendukung. Modal sosial yang dimiliki oleh calon bisa dicermati seperti, pekerjaan, tingkat pendidikan, ketokohnya yang terdapat di masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan Modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dalam membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena adanya kepercayaan.

Latar belakang sosial yang dimiliki aktor bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan Modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan. Kepercayaan di gunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan. Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat

¹² Richard Harker, dkk, (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik; Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu, (Yogyakarta : Jalasutra, 2009)

menentukan pemenangan seorang aktor dalam kontetasi politik, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut.

Pierre Bourdieu (1970), mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) yang menmberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”. Bourdieu juga menyampaikan bahwa modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan atau berkerkaitan antara satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk sosial capital (modal sosial) yang berupa insitusi lokal atau beberapa kekayaan sumber daya alam lainnya. Pendapatnya menegaskan tentang bahwa modal sosial mengarah pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu.

B. Modal Simbolik

Modal simbolik adalah salah satu sumber daya yang dioptimalkan untuk meraih kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik pada dasarnya membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor, prestise, gelar, status yang lebih tinggi, dan keluarga ternama. Artinya bahwa modal simbolik di sini dimaksudkan sebagai semua bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional atau non-institusional. Simbol itu sendiri memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas, yang mampu menggiring orang untuk mempercayai, mengakui dan

mengubah pandangan mereka tentang realitas seseorang, sekelompok orang, sebuah partai politik, atau sebuah bangsa.¹³

Modal simbolik mengacu pada derajat akumulasi prestise, ketersohoran, konsekrasi atau kehormatan, dan dibangun di atas dialektika pengetahuan (*connaissance*) dan pengenalan (*reconnaissance*). Modal simbolik tidak lepas dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi, berkat akibat khusus suatu mobilisasi. Modal simbolik bisa berupa kantor yang luas di daerah mahal, mobil dengan sopirnya, namun bisa juga petunjuk-petunjuk yang tidak mencolok mata yang menunjukkan status tinggi pemiliknya. Misalnya, gelar pendidikan yang dicantumkan di kartu nama, cara bagaimana membuat tamu menanti, cara mengafirmasi otoritasnya¹⁴. Meskipun memiliki peran penting dalam praktik, modal-modal tersebut tidak otomatis memiliki kekuatan signifikan di dalam suatu ranah. Setiap ranah memiliki kebutuhan modal spesifik yang berbeda dengan kebutuhan ranah lain. Kekuatan modal ekonomi seseorang dalam ranah kekuasaan boleh jadi efektif memampukannya bertarung, namun dalam ranah sastra, yang pertaruhannya ada pada legitimasi, yang dibutuhkan lebih pada modal kultural serta modal simbolik. Bourdieu mengilustrasikan perbedaan jenis modal yang signifikan

¹³ Modal simbolik kekuasaan dalam naskah drama bunga rumah makan karya utuy tatang sontani (kajian pierre bourdiue), Jurnal. <http://jurnal.unprimdn.ac.id>.

¹⁴ Haryatmoko, "Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu: Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa", Jurnal/ Majalah BASIS, No. 11-12 (November-Desember 2003), 43-45

2.1 Kerangka Pemikiran

politik keluarga telah menjadi salah satu budaya politik yang tengah marak berkembang di Indonesia sekaligus menjadi salah satu aspek politik di Indonesia yang menarik untuk di kaji lebih jauh. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya politik dinasti membahas mengenai sekumpulan orang atau elit penguasa yang masih memiliki hubungan atau ikatan keluarga dekat yang saling mendukung dan secara bergantian menduduki kekuasaan melalui pemilihan disetiap periode nya. Diberbagai macam kekuasaan yang ada dalam lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif.

Pada pemilihan Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Bone Bupati petahana H. Andi Fahsar Padjalangi dan kemudian, Pada Pemilihan umum 2019 Andi Yagkin Padjalangi dan ponakannya Andi Rio Padjalangi mencalonkan sebagai anggota DPR-RI namun hanya Andi Rio Padjalangi yang terpilih dan mendapatkan kursi di DPR-RI dan Andi Izman Padjalangi terpilih juga sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adapun saudara dari Bupati Bone yaitu ditunjuk dr. Hj. A. Khasma Padjalangi. M.Kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten bone. Dengan banyaknya dari keluarga Padjalangi yang mengisi posisi jabatan yang strategis sehingga membentuk sebuah kekuasaan keluarga yang begitu kuat dan menciptakan sebuah politik dinasti yang memiliki kecenderungan yang mengarah positif dalam roda pemerintahan di Kabupaten Bone.

2.1.1 Skema Kerangka Pikir

